Bupati Tamzil: Batas wilayah penting bagi kedaulatan desa

Jakarta-Tak terasa lima tahun sudah sejak UU desa dilahirkan. Tentunya ini merupakan momentum yang strategis untuk melakukan refleksi terhadap berlakunya UU desa sejauh ini. Hal itu menjadi salah satu yang mendorong Forum Desa Mandiri tanpa Korupsi (FKDM) dan Lembaga Daulat Desa (LDD) untuk menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bersama Media "Rembuk Nasional untuk Kedaulatan Desa" yang dihelat di Bentara Budaya Jakarta (15/1). Tampil sebagai panelis adalah sosok-sosok yang dianggap peduli terhadap kedaulatan desa. Ada Ahmad Bahrudin (FKDM),Raymond Toruan (LDD),Ahmad Erani Yustika (staf khusus Presiden bidang ekonomi),Ahmad Muqowam (Pansus UU Desa), dan Bupati Kudus HM Tamzil sebagai satu-satunya kepala daerah yang hadir dalam diskusi tersebut.

Raymond Toruan membuka diskusi dengan penekanannya pada urgensi forum tersebut."Forum seperti ini diperlukan untuk memberi pencerahan bersama tentang berbagai persoalan aktual tentang desa, termasuk didalamnya ada batas wilayah yang memang diperlukan dalam konteks berbicara tentang kedaulatan desa," ujarnya dihadapan berbagai awak media,akademisi dan stakeholder terkait.

Bupati Tamzil membawakan paparan dengan judul Batas Desa sebagai Dasar Kewenangan Desa dalam Mengelola Desa dan Sumber Daya Desa. Dalam paparan tersebut,dijelaskan bahwa pada tahun 2017,Pemkab Kudus bekerjasama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) telah melakukan pemetaan batas desa. Sementara,pada tahun 2015 Perda no 1 tahun 2015 ditetapkan dengan memuat tentang penetapan desa dan kelurahan serta luas wilayah.

"Ditetapkannya batas desa ini akan memberi ketegasan dan kejelasan desa dalam mengatur dan mengurus warganya maupun pemerintahannya," imbuhnya.

Disebutnya pula bahwa batas desa merupakan prasyarat menuju kedaulatan desa,selain faktor pengelolaan desa, kejelasan kewenangan desa,dan ketersediaan sumber daya.

Diskusi makin menarik karena selain menghadirkan para praktisi dan pakar di bidangnya, juga karena menghadirkan beberapa kepala desa,termasuk Wahyudi Anggoro Hadi, kepala desa Panggungharjo Bantul. Bagaimanapun juga sudut pandang mereka dibutuhkan sebagai representasi dari para pemangku kepentingan di desa.